



LAPORAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2021



BIDANG DATA DAN INFORMASI
DINAS PMPTSP PROVINSI JAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan ini disusun sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Laporan perizinan berusaha berbasis risiko yang disusun terdiri dari jumlah perizinan yang diterbitkan, rencana investasi, realisasi investasi, kendala dan solusi. Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang dari seluruh Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat kepada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan dan validasi data yang menghasilkan rekapitulasi data untuk dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri secara berkala.

Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak baik internal maupun eksternal Dinas PMPTSP di Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ruang Lingkup	4
BAB II REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	6
2.1 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota	6
2.2 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan	8
2.3 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Respon	10
2.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Jenis Perizinan	11
2.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Kode KBLI	11
2.6 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Tingkat Resiko	14
2.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal	15

BAB III RENCANA INVESTASI.....	16
3.1 Jumlah Proyek Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota.....	16
3.2 Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Investasi	18
3.3 Jumlah Proyek Berdasarkan Kode KBLI	20
3.4 Jumlah Proyek Berdasarkan Tingkat Risiko	22
3.5 Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal	23
BAB IV REALISASI INVESTASI	24
BAB V KENDALA DAN SOLUSI	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan kewenangan Prov/Kab/Kota secara urut	8
Gambar 2.2 Jumlah Perizinan Berusaha yang Diterbitkan per Bulan.....	9
Gambar 2.3 Jumlah perizinan Berusaha Berdasarkan Status Respon	10
Gambar 2.4 Jumlah perizinan OSS RBA berdasarkan jenis perizinan	11
Gambar Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI 10 terbesar secara urut	13
Gambar 2.6 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko	14
Gambar 2.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal	15
Gambar 3.1 Jumlah Proyek Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota Secara Urut dari Jumlah Besar ke Kecil	18
Gambar 3.2 Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Investasi 10 Terbesar Secara Urut	20
Gambar 3.3 Jumlah Proyek OSS RBA Berdasarkan KBLI 10 terbesar secara urut	22
Gambar 3.4 Jumlah Proyek Berdasarkan Tingkat Risiko	23
Gambar 3.5 Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal	23
Gambar 5.1 Persentase Permasalahan OSS RBA.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota	7
Tabel 2.2 Jumlah Perizinan Berusaha yang Diterbitkan per Bulan	9
Tabel 2.3 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI	12
Tabel 3.1 Jumlah Proyek Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota	17
Tabel 3.2 Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Investasi	19
Tabel 3.3 Jumlah Proyek Berdasarkan KBLI	21
Tabel 4.1 Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN Provinsi Jawa Barat	25
Tabel 4.2 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat	26
Tabel 4.3 Jumlah Proyek Provinsi Jawa Barat.....	27
Tabel 5.1 Identifikasi Permasalahan OSS RBA di Provinsi Jawa Barat	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Implementasi pelaksanaan OSS RBA dikelola oleh Lembaga OSS yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko dimulai pada tanggal 4 Agustus 2021 yang secara langsung diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.

OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Pelaku Usaha dapat mengakses sistem OSS Berbasis Risiko melalui jaringan internet melalui laman <https://oss.go.id/> secara mandiri.

Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perizinan berbasis risiko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dinas PMPTSP di wilayah

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi, 9 Pemerintah Kota dan 18 Pemerintah Kabupaten sebagai berikut:

1. Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat
2. Dinas PMPTSP Kota Bandung
3. Dinas PMPTSP Kota Cirebon
4. Dinas PMPTSP Kota Bogor
5. Dinas PMPTSP Kota Cimahi
6. Dinas PMPTSP Kota Bekasi
7. Dinas PMPTSP Kota Depok
8. Dinas PMPTSP Kota Sukabumi
9. Dinas PMPTSP Kota Tasikmalaya
10. Dinas PMPTSP Kota Banjar
11. Dinas PMPTSP Kabupaten Sumedang
12. Dinas PMPTSP Kabupaten Cirebon
13. Dinas PMPTSP Kabupaten Kuningan
14. Dinas PMPTSP Kabupaten Majalengka
15. Dinas PMPTSP Kabupaten Bandung
16. Dinas PMPTSP Kabupaten Bandung Barat
17. Dinas PMPTSP Kabupaten Garut
18. Dinas PMPTSP Kabupaten Tasikmalaya
19. Dinas PMPTSP Kabupaten Ciamis
20. Dinas PMPTSP Kabupaten Pangandaran
21. Dinas PMPTSP Kabupaten Cianjur
22. Dinas PMPTSP Kabupaten Sukabumi

23. Dinas PMPTSP Kabupaten Bogor
24. Dinas PMPTSP Kabupaten Bekasi
25. Dinas PMPTSP Kabupaten Purwakarta
26. Dinas PMPTSP Kabupaten Karawang
27. Dinas PMPTSP Kabupaten Subang
28. Dinas PMPTSP Kabupaten Indramayu

Data jumlah perizinan berusaha berbasis risiko bersumber dari aplikasi OSS RBA yang diolah oleh Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota masing-masing. Kemudian data tersebut dilaporkan kepada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan surat Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Nomor 3350/PM.05.02.02/Datin Tanggal 23 Desember 2021 Hal Mekanisme Pelaporan Perizinan Tahun 2021. Selanjutnya data diolah kembali oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat menjadi satu kesatuan data perizinan berusaha berbasis risiko di wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021.

Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang dari Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota kepada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Kemudian dilakukan proses pengolahan data yang menghasilkan rekapitulasi data untuk dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan laporan perizinan berusaha berbasis risiko di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagaimana tercantum pada pasal 33 yang mengatur pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Waktu pelaporan secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, tetapi untuk pelaporan

tahun 2021 hanya sekali karena dimulai pada bulan Agustus 2021. Laporan perizinan berusaha berbasis risiko yang disusun sebagai berikut:

- a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
- b. rencana investasi;
- c. realisasi investasi;
- d. kendala dan solusi.

BAB II

REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Rekapitulasi data perizinan berusaha berbasis risiko berisi data perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas PMPTSP sesuai kewenangannya baik di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Data telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

1. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota;
2. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan;
3. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Respon;
4. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Jenis Perizinan;
5. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Kode KBLI;
6. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Tingkat Risiko;
7. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal.

2.1 Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota

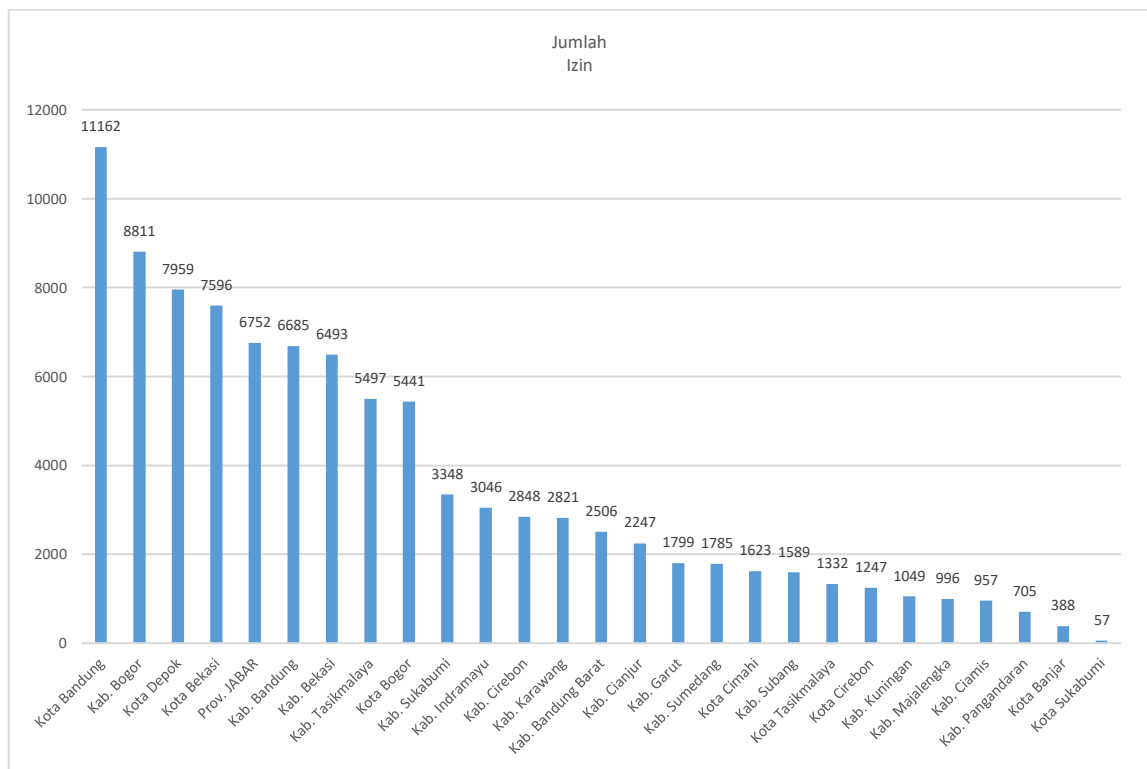
Pada tahun 2021 jumlah perizinan berusaha berbasis risiko di Provinsi Jawa Barat sebanyak 96.791. Jumlah tersebut terdiri dari 28 wilayah yang tersebar sesuai kewenangannya baik Provinsi/Kabupaten/Kota. Hasil dari pengolahan data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota

NO	INSTANSI (DINAS PMPTSP)	JUMLAH
1	Prov. Jawa Barat	6.752
2	Kab. Bogor	8.811
3	Kab. Sukabumi	3.348
4	Kab. Cianjur	2.247
5	Kab. Bandung	6.685
6	Kab. Garut	1.799
7	Kab. Tasikmalaya	5.497
8	Kab. Ciamis	957
9	Kab. Kuningan	1.049
10	Kab. Cirebon	2.848
11	Kab. Majalengka	996
12	Kab. Sumedang	1.785
13	Kab. Indramayu	3.046
14	Kab. Subang	1.589
15	Kab. Purwakarta	52
16	Kab. Karawang	2.821
17	Kab. Bekasi	6.493
18	Kab. Bandung Barat	2.506
19	Kab. Pangandaran	705
20	Kota Bogor	5.441
21	Kota Sukabumi	57
22	Kota Bandung	11.162
23	Kota Cirebon	1.247
24	Kota Bekasi	7.596
25	Kota Depok	7.959
26	Kota Cimahi	1.623
27	Kota Tasikmalaya	1.332
28	Kota Banjar	388
Grand Total		96.791

Apabila data diurutkan berdasarkan jumlah penerbitan perizinan berusaha dari paling besar sampai ke kecil dapat dilihat pada gambar 2.1. Dinas PMPTSP Kota Bandung memiliki data terbanyak sebesar 11.162, disusul oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Bogor sebesar 8.811 dan Dinas PMPTSP Kota Depok pada

posisi ketiga sebesar 7.959. Sedangkan Dinas PMPTSP Kota Sukabumi memiliki jumlah data penerbitan perizinan berusaha paling kecil sebesar 57. Banyak kemungkinan yang menjadi penyebab Dinas PMPTSP Kota Sukabumi memiliki data terkecil, dimana salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada Pelaku Usaha dalam mengimplementasikan OSS RBA.



Gambar 2.1
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan kewenangan Prov/Kab/Kota secaraurut

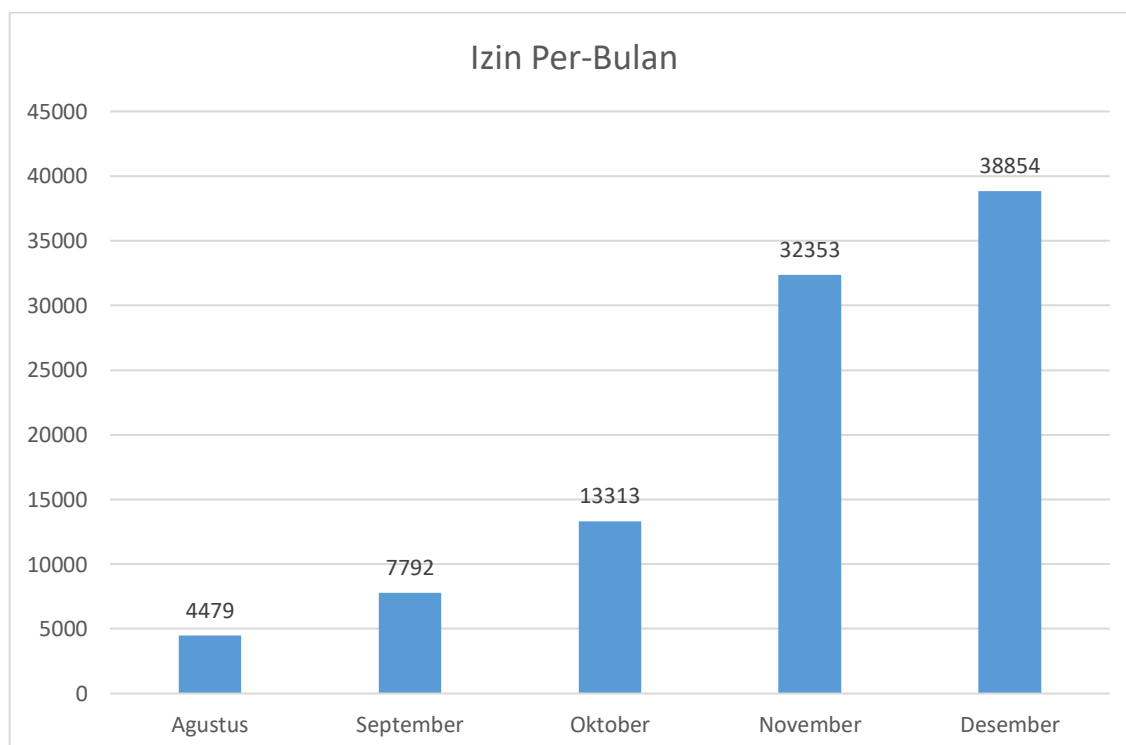
2.2 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan

Setelah resmi OSS RBA diluncurkan pada bulan Agustus 2021, terlihat pertumbuhan data pengguna layanan dari Pelaku Usaha dalam menggunakan aplikasi OSS RBA naik secara bertahap. Data pada bulan Agustus berjumlah 4.470 sebesar 5% dari total pemohon tahun 2021. Bulan September mengalami

kenaikan sebesar 8% pada jumlah 7.792, yang kemudian terus mengalami kenaikan cukup signifikan sampai pada bulan Desember sebanyak 40% dengan jumlah 38.854. Hal ini seperti tergambar pada tabel 2.2, secara ilustrasi melalui grafik pertumbuhannya terlihat pada gambar 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah Perizinan Berusaha yang Diterbitkan per Bulan

NO	BULAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Agustus	4.479	5%
2	September	7.792	8%
3	Oktober	13.313	14%
4	November	32.353	33%
5	Desember	38.854	40%
GRAND TOTAL		96.791	100%

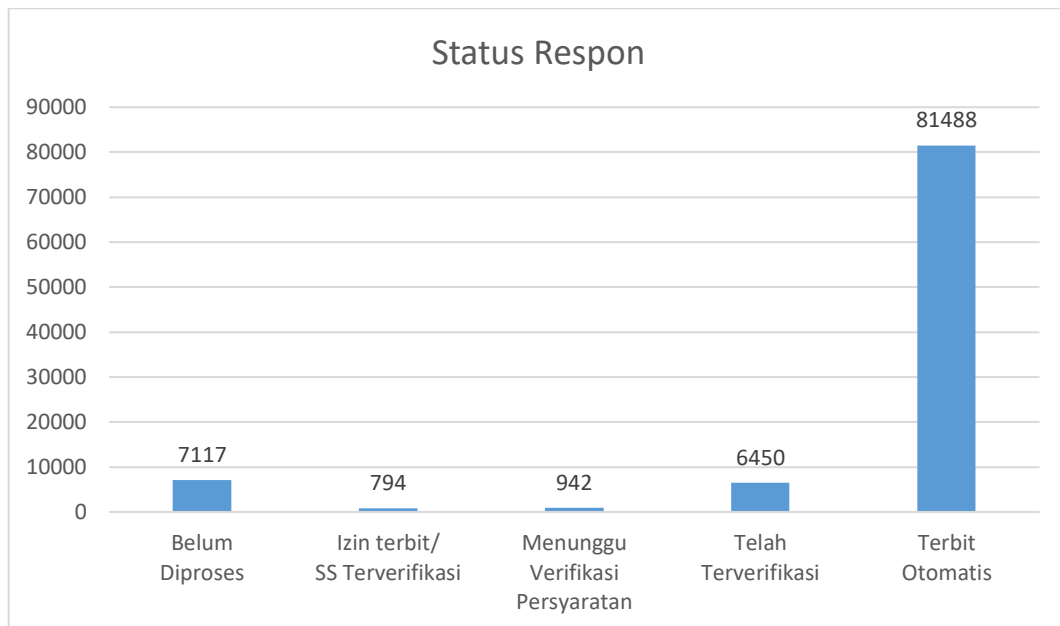


Gambar 2.2
Jumlah Perizinan Berusaha yang Diterbitkan per Bulan

2.3 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status

Respon

Data perizinan berusaha berdasarkan status respon ini terlihat bahwa proses perizinan berusaha yang terbit secara otomatis berjumlah 81.488 seperti pada gambar 2.3. Hal ini berarti bahwa mekanisme perizinan yang memiliki tingkat risiko rendah dan menengah rendah sangat banyak dan prosesnya sangat cepat karena tidak adanya verifikasi secara teknis oleh dinas teknis terkait.

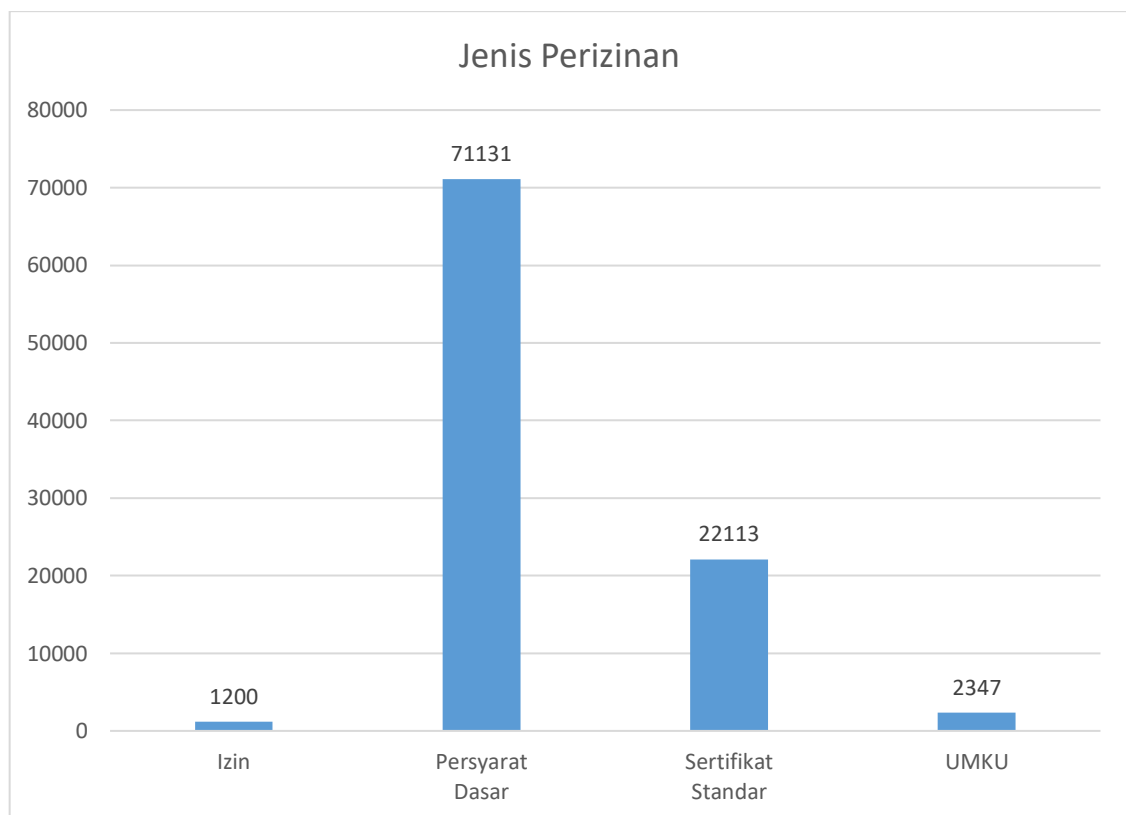


Gambar 2.3
Jumlah perizinan Berusaha Berdasarkan Status Respon

2.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Jenis

Perizinan

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan jenis perizinan terlihat bahwa persyaratan dasar memiliki jumlah paling besar yaitu 71.131. Hal tersebut terjadi karena merupakan izin dasar yang harus ditempuh oleh setiap Pelaku Usaha dalam mengajukan perizinan berusaha sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.4.



Gambar 2.4
Jumlah perizinan OSS RBA berdasarkan jenis perizinan

2.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Kode KBLI

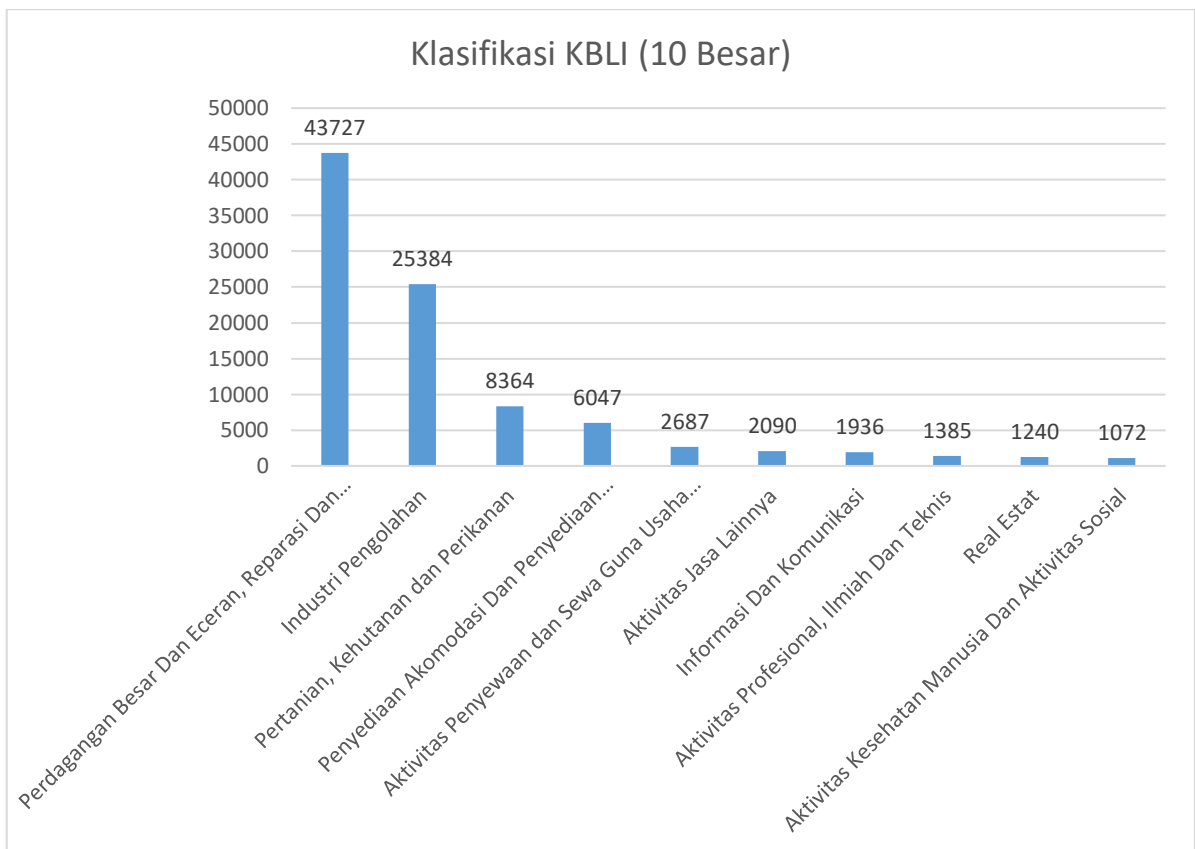
Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Kode KBLI sebagaimana pada tabel 2.3 menunjukkan jumlah keseluruhan perizinan berusaha berdasarkan nama KBLI tahun 2020 yang berlaku pada aplikasi OSS

RBA. Jumlah sektor atau nama KBLI terdiri dari 19 rumpun atau kelompok, tetapi tidak menunjukkan sektor yang mencerminkan perizinan yang dikeluarkan berdasarkan Kementerian masing-masing yang diatur sebelum OSS RBA.

Tabel 2.3
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI

NO	NAMA KBLI	JUMLAH
1	Pendidikan	323
2	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	166
3	Real Estat	1.240
4	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.364
5	Industri Pengolahan	25.384
6	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	43.727
7	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	6.047
8	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	1.385
9	Konstruksi	257
10	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	360
11	Pengangkutan dan Pergudangan	859
12	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1.072
13	Informasi Dan Komunikasi	1.936
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	2.687
15	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	836
16	Aktivitas Jasa Lainnya	2.090
17	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	26
18	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	21
19	Pertambangan dan Penggalian	11
Grand Total		96.791

Sedangkan apabila diurutkan 10 besar berdasarkan kode KBLI, maka data yang terbesar mengajukan perizinan berusaha pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sejumlah 43.727. Kemudian diikuti oleh sektor Industri Pengolahan yang menduduki urutan kedua terbesar dengan jumlah 25.384 dan yang ketiga sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan jumlah 8.364 seperti tergambar pada gambar 2.5.

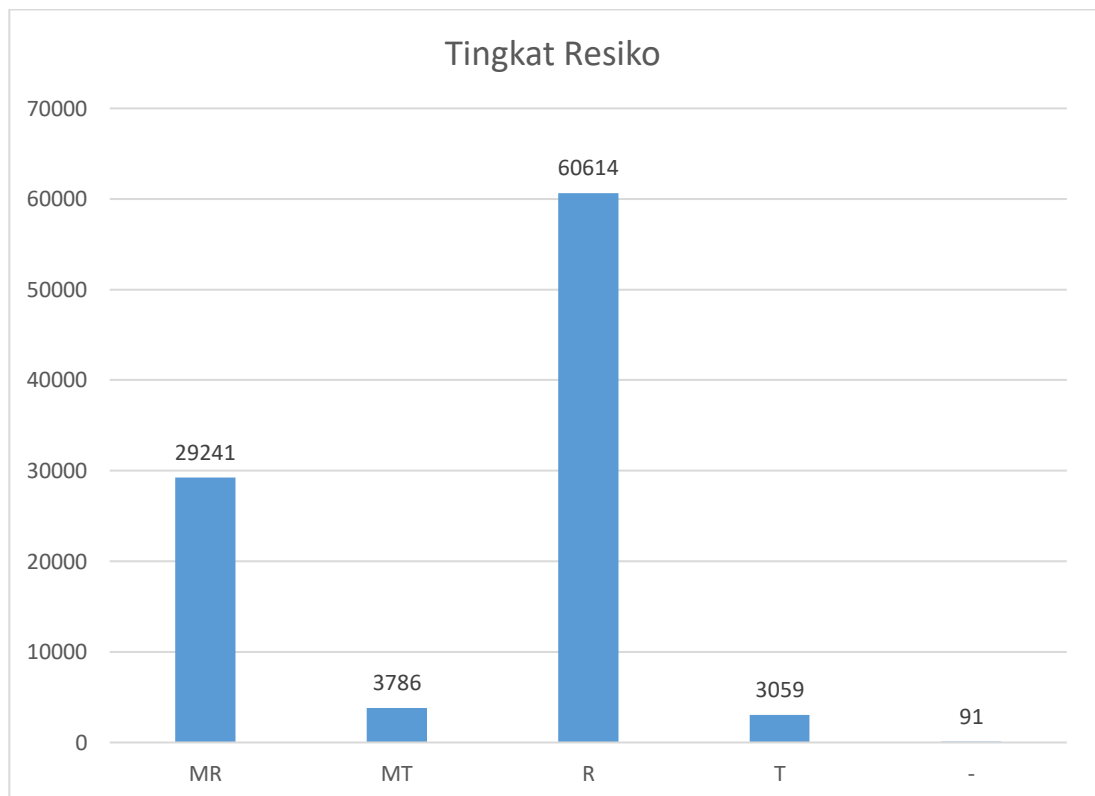


Gambar 2.5
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Kode KBLI 10 terbesar secaraurut

2.6 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Tingkat

Risiko

Data perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko tercermin pada gambar 2.6, dimana perizinan tingkat risiko rendah memiliki jumlah data yang paling besar 60.614, disusul tingkat risiko menengah rendah 29.241, tingkat risiko menengah tinggi sebesar 3.786 dan tingkat risiko tinggi sebesar 3.059. Sementara untuk data sebesar 91 masih dalam proses perizinan dasar yang belum ditentukan tingkat risiko perizinan berusahanya oleh sistem OSS RBA.

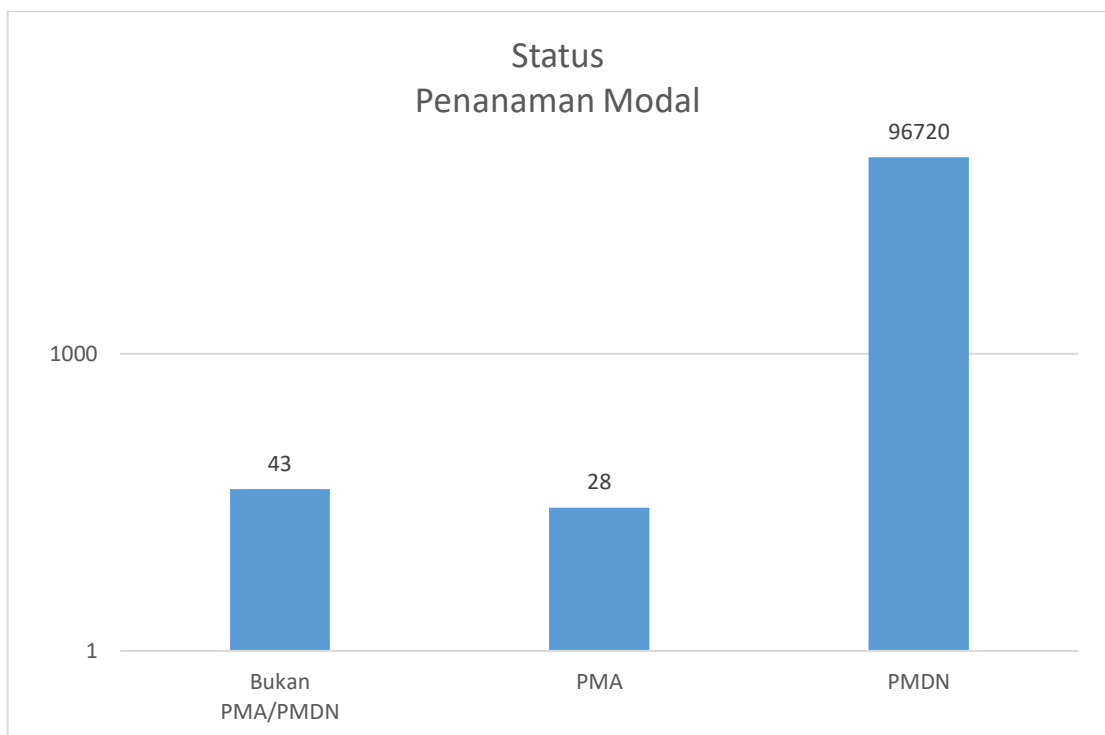


Gambar 2.6
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko

2.7 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status

Penanaman Modal

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal yang terbesar dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah 96.720. Sementara untuk Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 28 dan untuk non PMA/PMDN berjumlah 43. Secara grafik berdasarkan status penanaman modal ini dapat dilihat pada gambar 2.7.



Gambar 2.7
Jumlah Perizinan Berusaha Berdasarkan Status Penanaman Modal

BAB III

RENCANA INVESTASI

Rincian data rencana investasi diambil dari aplikasi OSS RBA yang merupakan hasil input data dari Pelaku Usaha yang sifatnya *Self Declared* pada saat mengajukan perizinan berusaha berbasis risiko. Periode pengumpulan data mulai dari tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dari akun pelaporan Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota yang dilaporkan kepada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya dilakukan tahapan proses pengolahan data, validasi dan pembersihan data sehingga menghasilkan rincian data rencana investasi di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Jumlah Proyek Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota;
2. Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Investasi;
3. Jumlah Proyek Berdasarkan Kode KBLI;
4. Jumlah Proyek Berdasarkan Tingkat Risiko;
5. Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal.

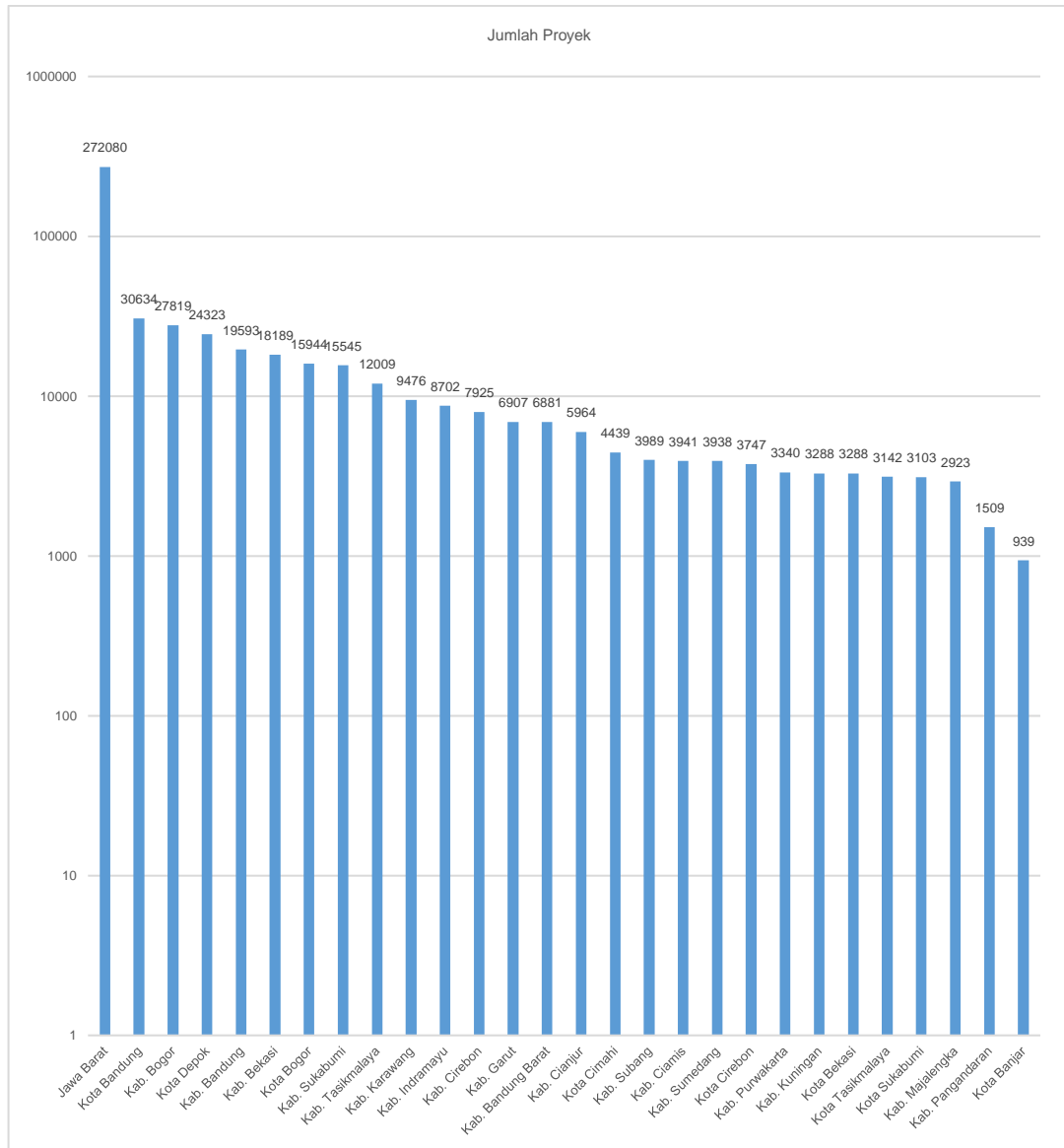
3.1 Jumlah Proyek Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota

Jumlah proyek yang diambil dari OSS RBA tahun 2021 sebesar 523.577 proyek di Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlihat pada tabel 3.1. Jumlah tersebut secara umum berupa rencana investasi yang tercantum pada aplikasi perizinan OSS RBA.

Apabila data tersebut terlihat Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki data rencana proyek terbesar sebanyak 272.080 proyek, disusul oleh Kota Bandung sebanyak 30.634 proyek dan Kota Banjar merupakan kota yang paling kecil jumlah proyeknya sebanyak 939 proyek. Hal ini tergambar pada gambar 3.1.

Tabel 3.1
Jumlah Proyek Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota

NO	INSTANSI (DINAS PMPTSP)	JUMLAH IZIN
1	Prov. Jawa Barat	272.080
2	Kab. Bogor	27.819
3	Kab. Sukabumi	15.545
4	Kab. Cianjur	5.964
5	Kab. Bandung	19.593
6	Kab. Garut	6.907
7	Kab. Tasikmalaya	12.009
8	Kab. Ciamis	3.941
9	Kab. Kuningan	3.288
10	Kab. Cirebon	7.925
11	Kab. Majalengka	2.923
12	Kab. Sumedang	3.938
13	Kab. Indramayu	8.702
14	Kab. Subang	3.989
15	Kab. Purwakarta	3.340
16	Kab. Karawang	9.476
17	Kab. Bekasi	18.189
18	Kab. Bandung Barat	6.881
19	Kab. Pangandaran	1.509
20	Kota Bogor	15.944
21	Kota Sukabumi	3.103
22	Kota Bandung	30.634
23	Kota Cirebon	3.747
24	Kota Bekasi	3.288
25	Kota Depok	24.323
26	Kota Cimahi	4.439
27	Kota Tasikmalaya	3.142
28	Kota Banjar	939
Grand Total		523.577



Gambar 3.1
 Jumlah Proyek Berdasarkan Kewenangan Prov/Kab/Kota Secara Urut
 dari Jumlah Besar ke Kecil

3.2 Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Investasi

Jumlah data proyek yang diambil dari aplikasi OSS RBA berdasarkan nilai investasi sebesar Rp. 2.312.980.475.834.280,- atau sebesar 2.312 triliun. Nilai tersebut belum sampai pada realisasi investasi karena prosesnya sampai

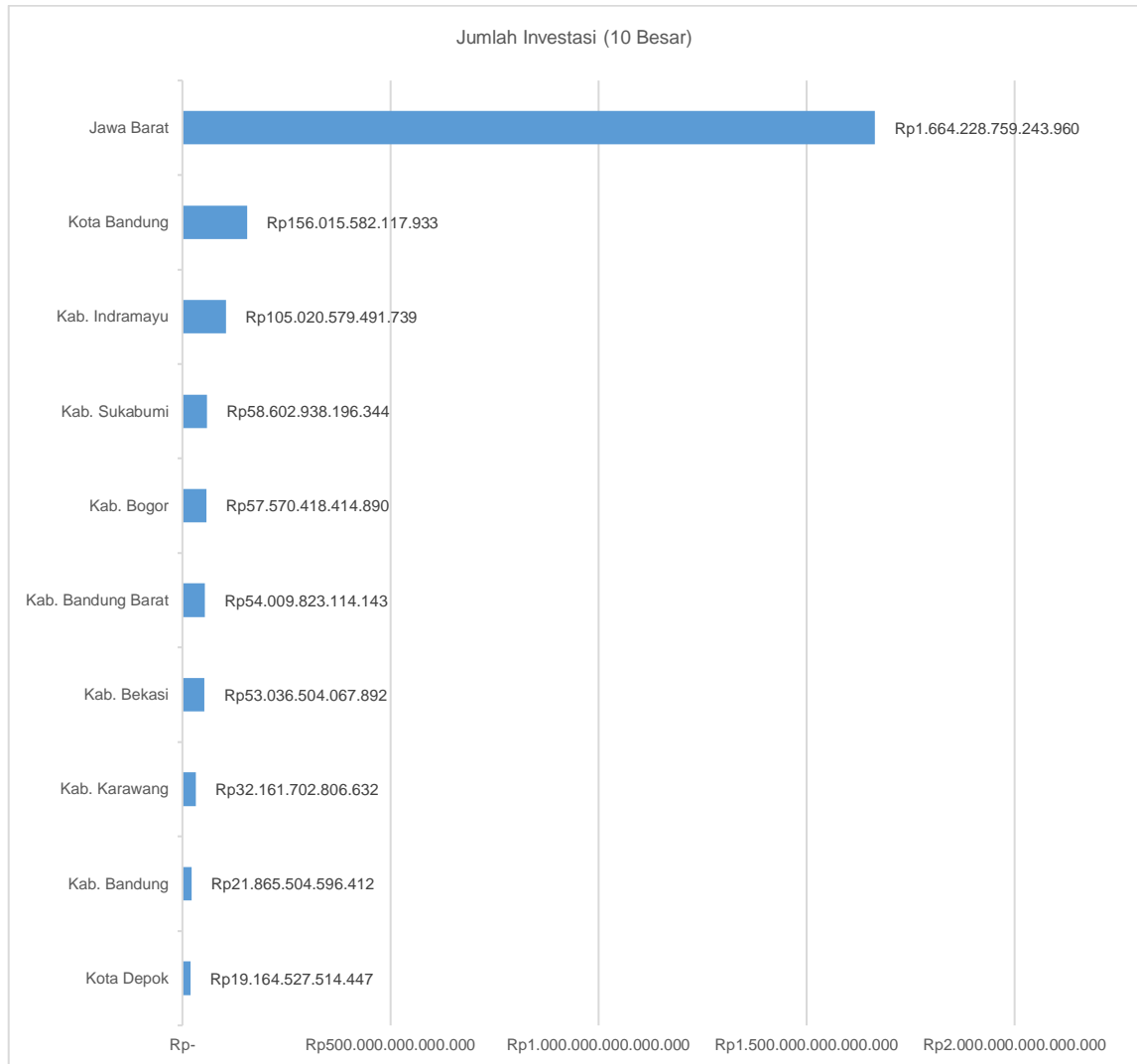
tahapan perencanaan yang diinput oleh Pelaku Usaha. Adapun data tersebut terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Investasi

No	Prov. Kab/Kota	Jumlah (Rupiah)
1	Jawa Barat	1.664.228.759.243.960
2	Kab. Bogor	57.570.418.414.890
3	Kab. Sukabumi	58.602.938.196.344
4	Kab. Cianjur	4.455.843.654.864
5	Kab. Bandung	21.865.504.596.412
6	Kab. Garut	15.378.223.257.544
7	Kab. Tasikmalaya	1.196.961.557.082
8	Kab. Ciamis	843.942.060.831
9	Kab. Kuningan	1.661.348.740.903
10	Kab. Cirebon	13.584.204.338.306
11	Kab. Majalengka	5.091.582.989.711
12	Kab. Sumedang	3.228.900.978.862
13	Kab. Indramayu	105.020.579.491.739
14	Kab. Subang	11.203.334.652.534
15	Kab. Purwakarta	11.812.594.556.791
16	Kab. Karawang	32.161.702.806.632
17	Kab. Bekasi	53.036.504.067.892
18	Kab. Bandung Barat	54.009.823.114.143
19	Kab. Pangandaran	608.517.862.982
20	Kota Bogor	6.058.572.158.880
21	Kota Sukabumi	2.461.955.980.519
22	Kota Bandung	156.015.582.117.933
23	Kota Cirebon	5.359.307.598.248
24	Kota Bekasi	1.661.348.740.903
25	Kota Depok	19.164.527.514.447
26	Kota Cimahi	3.677.563.343.154
27	Kota Tasikmalaya	1.833.120.151.151
28	Kota Banjar	1.186.813.646.629
Grand Total		2.312.980.475.834.280

Apabila data nilai investasi tersebut digambarkan secara grafik berdasarkan urutan 10 terbesar secara urut di Provinsi Jawa Barat sebagaimana pada gambar 3.2. Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat memiliki data rencana investasi terbesar

dengan nilai Rp. 1.664.228.759.243.960,- disusul oleh Kota Bandung senilai Rp. 156.015.582.117.933 pada posisi kedua dan Kabupaten Indramayu senilai Rp. 105.020.579.491.739 pada posisi ketiga.



Gambar 3.2
Jumlah Proyek Berdasarkan Nilai Investasi 10 Terbesar Secara Urut

3.3 Jumlah Proyek Berdasarkan Kode KBLI

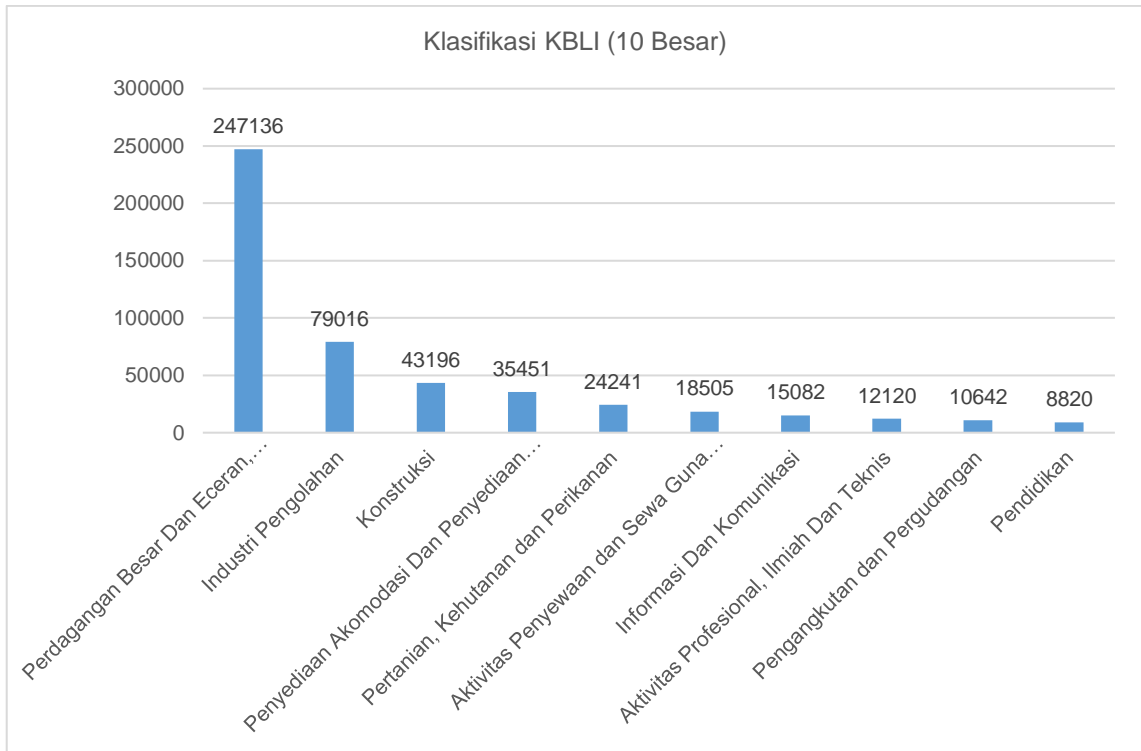
Jumlah proyek OSS RBA dikelompokkan berdasarkan kode KBLI tahun 2020 ada 19 rumpun atau sektor kode KBLI, seperti terlihat pada tabel 3.3. Walaupun sebetulnya tabel tersebut tidak menunjukkan kelompok atau sektor

yang diatur melalui perizinan sebelum Undang Undang Ciptakerja dikeluarkan tahun 2020.

Berdasarkan kode KBLI tersebut diurutkan menjadi 10 besar yang paling diminati oleh Pelaku Usaha dalam mengajukan proses perizinan berusaha berbasis risiko. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran memiliki data terbesar, disusul Industri Pengolahan dan Konstruksi sebagaimana terlihat pada gambar 3.3.

Tabel 3.3
Jumlah Proyek Berdasarkan KBLI

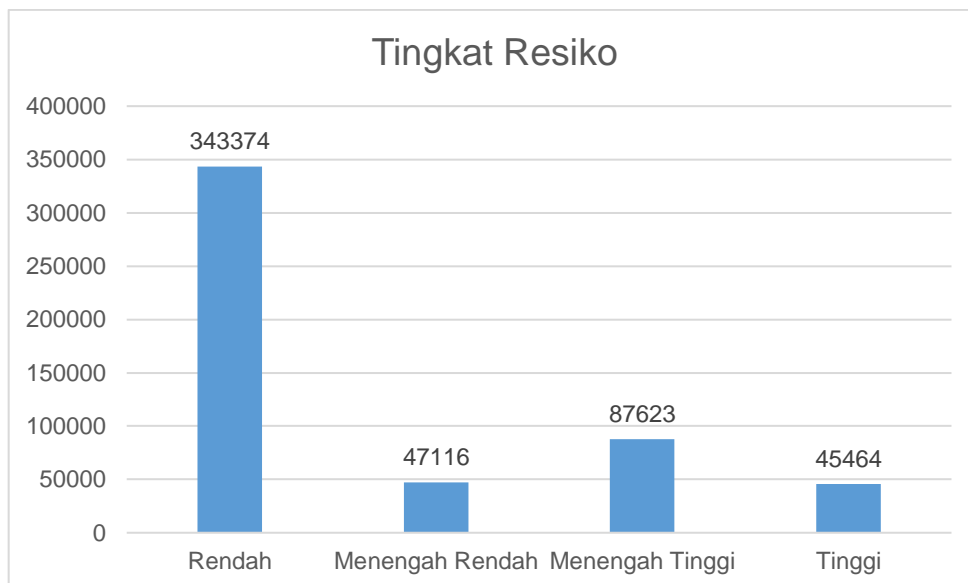
No	Klasifikasi KBLI	Jumlah
1	Aktivitas Jasa Lainnya	7.164
2	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	5.519
3	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.922
4	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	18.505
5	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	12.120
6	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	108
7	Industri Pengolahan	79.016
8	Informasi Dan Komunikasi	15.082
9	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	3.066
10	Konstruksi	43.196
11	Pendidikan	8.820
12	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	1.356
13	Pengangkutan dan Pergudangan	10.642
14	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	35.451
15	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	247.136
16	Pertambangan dan Penggalian	2.357
17	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24.241
18	Real Estat	4.935
19	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	2.941
Grand Total		523.577



Gambar 3.3
Jumlah Proyek OSS RBA Berdasarkan KBLI 10 terbesar secaraurut

3.4 Jumlah Proyek Berdasarkan Tingkat Risiko

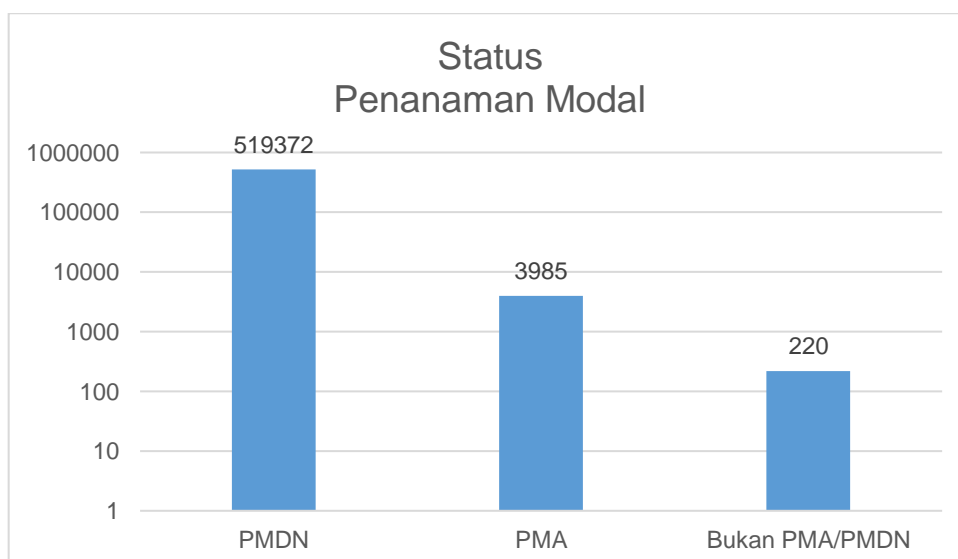
Data jumlah rencana proyek pada aplikasi OSS RBA berdasarkan tingkat risiko paling dominan oleh Pelaku Usaha yang mengajukan proses perizinan berusaha dengan tingkat risiko rendah dengan jumlah 343.374. Kemudian tingkat risiko menengah tinggi berada pada posisi kedua terbesar 87.623, disusul tingkat menengah rendah dengan jumlah 47.116 dan yang yang terakhir dengan tingkat risiko tinggi berjumlah 45.464. Data tersebut terlihat pada gambar 3.4.



Gambar 3.4
Jumlah Proyek Berdasarkan Tingkat Risiko

3.5 Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal

Jumlah proyek pada aplikasi OSS RBA yang mengajukan perizinan berusaha berdasarkan status penanaman modal masih didominasi oleh PMDN berjumlah 519.372, disusul PMA berjumlah 3.985 dan terakhir bukan PMDN/PMA berjumlah 220. Data tersebut secara grafik terlihat pada gambar 3.5.



Gambar 3.5
Jumlah Proyek Berdasarkan Status Penanaman Modal

BAB IV

REALISASI INVESTASI

Target realisasi investasi tahun 2021 Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp. 127,34 Trilyun. Realisasi investasi yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat sebesar tahun 2021 sebesar Rp. 136,1 Trilyun. Berdasarkan hasil tersebut apabila dilihat persentasenya realisasi investasi melebihi target sebesar 106,90% dan secara nasional Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama.

Total Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang direalisasikan oleh Pelaku Usaha di 27 (duapuluh tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan jumlah investasi sebesar Rp. 136.126.809.043.668,-. Realisasi investasi tersebut menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 109.331 orang dan jumlah LKPM sebanyak 31.804 LKPM.

Posisi yang diminati investasi pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat diraih yang pertama oleh Kabupaten Bekasi dengan nilai Rp. 43.263.318.677.221, kedua diikuti oleh Kabupaten Karawang dengan nilai Rp. 26.632.412.629.368 dan ketiga oleh Kota Bandung dengan nilai Rp. 11.446.494.680.561. Sementara realisasi investasi pada urutan terbawah oleh Kota Banjar dengan nilai Rp. 1.086.900.000. Data realisasi investasi per Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN Provinsi Jawa Barat

NO	KAB./KOTA	INVESTASI (Rp.)	RASIO (%)
1	Kab Bekasi	43.263.318.677.221	31,78
2	Kab Karawang	26.632.412.629.368	19,56
3	Kota bandung	11.446.494.680.561	8,41
4	Kab Bogor	9.896.928.972.343	7,27
5	Kota Bekasi	8.167.096.033.071	6,00
6	Kab Subang	5.426.162.190.611	3,99
7	Kab Cirebon	4.860.390.192.005	3,57
8	Kab Purwakarta	4.730.175.771.420	3,47
9	Kab Sumedang	4.249.320.950.689	3,12
10	Kota Depok	3.515.916.753.452	2,58
11	Kab Bandung Barat	2.818.444.893.202	2,07
12	Kab Bandung	2.392.936.798.516	1,76
13	Kab Sukabumi	2.021.734.800.106	1,49
14	Kab Indramayu	1.908.049.068.463	1,40
15	Kab Garut	1.290.083.990.440	0,95
16	Kab Majalengka	1.199.302.449.053	0,88
17	Kab Cianjur	965.719.758.716	0,71
18	Kota Bogor	618.472.107.486	0,45
19	Kota Cimahi	405.582.308.191	0,30
20	Kota Sukabumi	197.503.939.856	0,15
21	Kota Cirebon	80.129.819.169	0,06
22	Kab. Pangandaran	18.942.100.000	0,01
23	Kab Tasikmalaya	8.599.700.000	0,01
24	Kab Kuningan	7.459.339.924	0,01
25	Kab Ciamis	3.186.999.971	0,00
26	Kota Tasikmalaya	1.357.219.836	0,00
27	Kota Banjar	1.086.900.000	0,00
		136.126.809.043.668	100

Dalam hal jumlah penyerapan tenaga kerja dari data realisasi investasi di Jawa Barat sedikit berbeda posisinya dimana yang paling besar oleh Kabupaten Bekasi dengan jumlah 25.846, kedua disusul oleh Kabupaten Subang dengan jumlah 16.406 dan ketiga oleh Kabupaten Karawang dengan jumlah 10.839. Sementara untuk penyerapan tenaga kerja paling sedikit masih sama oleh Kota Banjar dengan jumlah 4 sebagaimana tergambar pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat

NO	KAB./KOTA	TENAGA KERJA (orang)	RASIO (%)
1	Kab Bekasi	25.846	23,64
2	Kab Subang	16.406	15,01
3	Kab Karawang	10.839	9,91
4	Kab Bogor	10.612	9,71
5	Kab Sukabumi	8.599	7,87
6	Kota Bekasi	6.884	6,30
7	Kab Bandung	5.508	5,04
8	Kab Garut	5.006	4,58
9	Kota bandung	3.661	3,35
10	Kab Purwakarta	3.322	3,04
11	Kota Cimahi	2.714	2,48
12	Kota Depok	1.778	1,63
13	Kab Cirebon	1.659	1,52
14	Kota Bogor	1.634	1,49
15	Kab Bandung Barat	1.287	1,18
16	Kab Indramayu	1.095	1,00
17	Kab Sumedang	738	0,68
18	Kab Majalengka	704	0,64
19	Kota Cirebon	457	0,42
20	Kab Ciamis	157	0,14
21	Kab Cianjur	123	0,11
22	Kota Sukabumi	110	0,10
23	Kota Tasikmalaya	84	0,08
24	Kab. Pangandaran	53	0,05
25	Kab Kuningan	40	0,04
26	Kab Tasikmalaya	11	0,01
27	Kota Banjar	4	0,00
Total...		109.331	100

Apabila dilihat dari hasil realisasi investasi yang memiliki jumlah proyek yang paling besar diraih oleh Kabupaten Bekasi dengan jumlah proyek 7.773, disusul pada posisi kedua oleh Kota Bandung dengan jumlah proyek 3.530, dan ketiga oleh Kabupaten Bogor dengan jumlah proyek 3.388. Sementara pada posisi

terbawah oleh Kota Banjar dengan jumlah proyek 44, sebagaimana tergambar pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Jumlah Proyek Provinsi Jawa Barat

NO	KAB./KOTA	PROYEK	RASIO (%)
1	Kab Bekasi	7.773	24,44
2	Kota Bandung	3.530	11,10
3	Kab Bogor	3.388	10,65
4	Kota Bekasi	3.115	9,79
5	Kab Karawang	3.088	9,71
6	Kab Bandung	1.808	5,68
7	Kota Depok	1.377	4,33
8	Kab Purwakarta	1.160	3,65
9	Kota Bogor	1.011	3,18
10	Kab Cirebon	795	2,50
11	Kab Bandung Barat	616	1,94
12	Kab Sukabumi	536	1,69
13	Kab Subang	515	1,62
14	Kab Garut	458	1,44
15	Kota Cirebon	427	1,34
16	Kota Cimahi	413	1,30
17	Kab Sumedang	351	1,10
18	Kab Cianjur	258	0,81
19	Kota Tasikmalaya	226	0,71
20	Kab Majalengka	197	0,62
21	Kab Indramayu	177	0,56
22	Kota Sukabumi	168	0,53
23	Kab Kuningan	162	0,51
24	Kab. Pangandaran	78	0,25
25	Kab Ciamis	67	0,21
26	Kab Tasikmalaya	66	0,21
27	Kota Banjar	44	0,14
	Total	31.804	100

BAB V

KENDALA DAN SOLUSI

Sejak OSS RBA diluncurkan dalam implementasinya masih banyak Pelaku Usaha maupun Pemerintah Daerah sebagai pengguna layanan yang kesulitan dalam mengaplikasikan sistem perizinan berusaha berbasis risiko tersebut. Hal ini disadari karena aplikasi OSS RBA sebenarnya masih dalam tahap pengembangan sehingga kendala tersebut pasti banyak terjadi. Namun kendala tersebut sebetulnya dalam masa transisi implementasinya oleh pengguna layanan OSS RBA.

Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat melakukan inisiatif dengan menghimpun permasalahan implelementasi OSS RBA yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Tindak lanjutnya melalui surat Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Nomor 2804/PM.05.02.02/Datin Tanggal 18 Oktober 2021 Hal Inventarisasi Permasalahan Implelementasi OSS RBA di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Beberapa aspek permasalahan implementasi OSS RBA yang dihimpun dari Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota dikelompokkan sebagai berikut:

1. Aspek Sistem OSS RBA;
2. Aspek Regulasi;
3. Aspek Persyaratan;
4. Aspek Informasi dan Pengetahuan Teknis;
5. Aspek Proses Bisnis;
6. Aspek lain-lainnya.

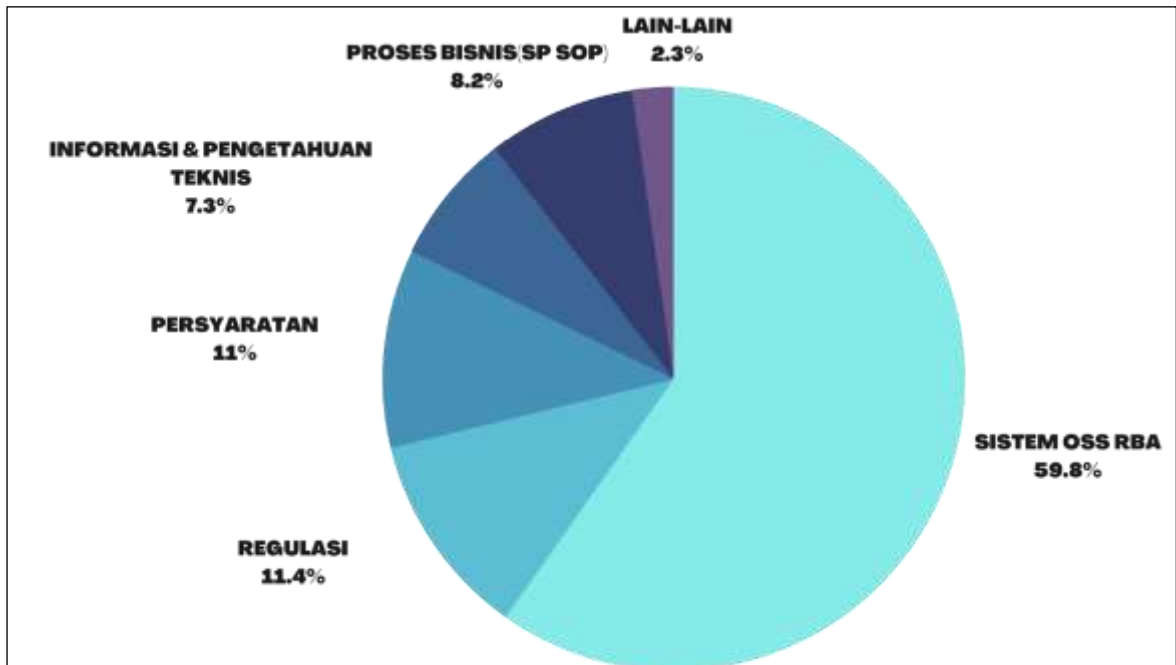
Hasil dari identifikasi permasalahan dari Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat secara lengkap dapat diakses melalui <https://bit.ly/PermasalahanOSSRBA>. Secara garis besar identifikasi permasalahan digambarkan sebagaimana tabel 5.1

Tabel 5.1
Identifikasi Permasalahan OSS RBA di Provinsi Jawa Barat

SISTEM OSS RBA	REGULASI	PERSYARATAN	INFORMASI & PENGETAHUAN TEKNIS	PROSES BISNIS	LAIN-LAIN
Fitur Menu Cetak NIB belum berfungsi	Ketidakselarasan UU 23/2014 dengan PP 5/2021	Ketidajelasan dokumen persyaratan	Banyak pelaku usaha yg belum mengetahui informasi terkait OSS RBA	Belum tersedianya helpdesk OSS RBA di DPMPSTP Kabupaten/ Kota	PB UMKU agar segera disediakan OSS RBA
Data yg sudah diinput tidak tersimpan di sistem	Ketidakselarasan PP 5/2021 dengan Peraturan Menteri Terkait	Banyak sektor KBLI yg belum ditetapkan NSPK nya	OSS RBA banyak melakukan maintenance dadakan tanpa adanya pemberitahuan di sistem	SLA / Jangka Waktu Verifikasi masih belum berjalan seluruhnya dan sebagian jangka waktu pada KBLI tidak muncul durasinya	Tidak adanya tindak lanjut untuk sistem yang melayani perizinan diluar perizinan berusaha
Tidak ada menu rekapitulasi izin	Dalam PP 5/2021 pd Bab III diatur mengenai NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, namun belum ada aturan khusus mengenai NSPK sbg acuan tunggal	Persyaratan yg ditetapkan di OSS RBA tidak sesuai dengan yg seharusnya (Contoh : Sektor pendidikan bukan sektor usaha, namun harus memiliki NIB)	Operator OSS di DPMPSTP perlu bimbingan&penjelasan terkait dengan permasalahan yang terjadi pada sistem	Helpdesk OSS RBA Slowrespon	
Menu & Fungsi pada layar unit pengawasan	Adanya KBLI yg belum bisa diproses shg menghambat		Belum adanya informasi mengenai kriteria khusus untuk		

belum berfungsi	penyelenggaraan perizinan berusaha		membentuk tim khusus pengawasan		
Tidak terdapat hak akses untuk unit pengelola	Belum ada aturan lebih lanjut yg mengatur pelaksanaan perizinan berusaha di beberapa sektor (Contoh : KKPR & PBG)		Kurangnya informasi terkait keberadaan Helpdesk OSS RBA di DPMPTSP Provinsi		

Apabila berdasarkan persentase permasalahan terbesar pada Sistem OSS RBA sebanyak 59,8%, disusul regulasi 11,4%, persyaratan 11%, proses bisnis 8,2%, informasi dan pengetahuan teknis 7,3% dan lain-lain 2,3%. Gambaran persentase permasalahan OSS RBA terlihat pada gambar 5.1. Seiring berjalannya waktu dalam implementasi OSS RBA yang terus dalam proses pengembangan dapat mengatasi kendala yang terjadi selama ini.



Gambar 5.1
Persentase Permasalahan OSS RBA